

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, sesuai dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 dan PP Nomor 58 Tahun 2005 telah mulai dilaksanakan secara bertahap pada penyusunan laporan keuangan Tahun 2007. Hal ini ditandai dengan adanya pengakuan atas penyusutan aset tetap yang diungkapkan dalam Neraca. Walaupun pengakuan beban atas penyusutan aset tetap tersebut belum bisa diungkapkan. Namun hal tersebut tidak lain disebabkan aturan yang menjadi pedoman bagi daerah belum mengatur tentang hal tersebut. Sampai dengan Tahun 2010, daerah dalam mengelola keuangannya masih berpedoman pada PP 24 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang secara garis besar masih berdasarkan basis akuntansi *Cash Toward Accrual (CTA)*.
2. Penerapan SAP berbasis akrual telah dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2015, hal ini diawali oleh penyusunan kebijakan akuntansi dengan basis akrual sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dalam Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa kebijakan akuntansi akrual pemerintah daerah ditetapkan paling lambat tanggal 31 Mei 2014.

3. Atas penetapan kebijakan akuntansi tersebut, dan untuk menilai kesiapan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah (khususnya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit negara telah melaksanakan audit kinerja atas kesiapan dan kesesuaian penerapan SAP Berbasis Akrual yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015. Audit kinerja yang tertuang melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 49/LHP/XVIII.PDG/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015. BPK melalui LHP tersebut merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk merevisi kebijakan akuntansinya antara lain berkenaan dengan pendapatan-akrual dan persediaan agar pengungkapannya lebih detail dan jelas guna dapat dilaksanakan sesuai SAP berbasis akrual. Atas rekomendasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan revisi kebijakan akuntansinya agar sesuai dengan ketentuan yang ada dalam SAP berbasis akrual.
4. Selanjutnya, hal yang menjadi kendala sebelum direleasnya Aplikasi SIMDA Keuangan ver 2.7.0.9 adalah pengakuan atas pendapatan dan beban. Pada SIMDA Keuangan versi sebelumnya, tidak ada pengakuan untuk pendapatan yang telah ada hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut, terutama untuk pendapatan yang diahului dengan penerbitan surat ketetapan. Pendapatan yang didahului dengan surat ketetapan, seharusnya pencatatan dan pengakuannya terjadi pada saat ketetapan atas suatu pendapatan diterbitkan. Dengan telah digunakannya Aplikasi SIMDA Keuangan versi

2.7.0.9 pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman permasalahan pengakuan pendapatan telah bisa teratasi. Melalui *tool* ketetapan pendapatan, secara otomatis sistem akan mencatat tanggal penetapan sebagai dasar pengakuan atas piutang pendapatan dan pendapatan.

5. Namun untuk beberapa hal yang berhubungan dengan pendapatan transfer, secara sistem sebenarnya hal tersebut telah dapat diakomodir oleh SIMDA Keuangan versi 2.7.0.9. Hanya saja dalam pelaksanaannya, hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Keadaan tersebut sebenarnya tidak mencerminkan prinsip akuntansi berbasis akrual.
6. Pengakuan beban dalam Aplikasi SIMDA Keuangan versi 2.7.0.9 telah dapat terlaksana, terutama untuk beban yang direalisasikan melalui mekanisme LS. Sedangkan untuk realiasi anggaran yang melalui mekanisme UP/GU/TU, pengakuan bebannya berdasarkan input bukti pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, bersamaan dengan pembayaran kas atas bukti pengeluaran tersebut. Pengakuan atas transaksi yang bersifat koreksi dan penyesuaian (seperti beban penyusutan dan amortisasi, penyesuaian piutang, beban persediaan) dilaksanakan melalui proses input manual ke Aplikasi SIMDA Keuangan.
7. Aplikasi SIMDA Keuangan versi 2.7.0.9 telah dapat menghasilkan komponen-komponen laporan yang terdapat dalam satu set laporan keuangan (kecuali Catatan atas Laporan Keuangan), yang terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial. Komponen laporan tersebut adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

8. Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca yang dihasilkan oleh Aplikasi SIMDA Keuangan versi 2.7.0.9 telah dapat mencerminkan hubungan antara ketiga laporan tersebut. Keterkaitan antar tiga laporan tersebut dapat dilihat pada akun Surplus/Defisit-LO dan akun Ekuitas Akhir. Dari laporan keuangan yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa Aplikasi SIMDA Keuangan telah dapat mengakomodir SAP berbasis akrual.
9. Penggunaan Aplikasi SIMDA Keuangan versi 2.7.0.9 telah banyak memberi kemudahan bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penggunaan Aplikasi SIMDA Keuangan adalah meningkatkan pemahaman *user* tentang SAP berbasis akrual.
10. Hal lain yang menjadi keterbatasan SIMDA Keuangan adalah adanya ketidaksinkronan antar peraturan perundangan terkait penyusunan laporan keuangan.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menerapkan SAP berbasis akrual pada pendapatan transfer.

2. Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) berkenaan dengan pemahaman SAP berbasis akrual.
3. Pengembangan lebih lanjut Aplikasi SIMDA Keuangan masih harus terus dilakukan, terutama dalam pengakuan persediaan dan beban persediaan yang tidak bisa secara otomatis dipilah oleh Aplikasi SIMDA Keuangan.
4. Dari segi regulasi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah didorong untuk terus melakukan perbaikan dan revisi atas kebijakan tersebut. Sehingga nantinya penerapan SAP berbasis akrual dapat terlaksana secara paripurna.
5. BPKP selaku pengembang SIMDA Keuangan diharapkan untuk terus melakukan penyempurnaan atas aplikasi yang ada, agar kedepannya SIMDA Keuangan dapat terintegrasi secara vertikal dan horizontal.
6. Untuk penelitian berikutnya, diharapkan ada penelitian tentang penerapan SAP Berbasis Akrual pada pemerintah daerah yang telah menggunakan SIMDA Keuangan dihubungkan dengan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperoleh, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan penerapan SAP Berbasis Akrual dengan menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan.